KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pemerintah dan DPR Teken RUU Pemilu
Tanggal : Jumat, 14 Juli 2017
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Pemerintah dan DPR Teken RUU Pemilu

Fraksi PDIP, Golkar, NasDem, PPP, dan Hanura memilih paket A dengan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%-25%,

Christian Dior Simbolon
dior@mediaindonesia.com

KENDATI fraksi-fraksi di DPR masih belum menyepakati salah satu dari lima opsi dari isu krusial sebagai putusan, pemerintah dan DPR sepakat menandatangani naskah RUU Pemilu yang sudah rampung, di luar lima isu krusial .

Lima opsi krusial yang belum diputuskan itu akan terus dimusyawarahkan hingga menjelang Rapat Paripurna DPR yang dijadwalkan akan berlangsung 20 Juli mendatang.

"Masih ada yang perlu disinkronisasikan, termasuk lima poin yang belum diputuskan. Kita tentu masih berharap pengambilan keputusan mudah-mudahan masih bisa dimusyawarahkan sebab dengan semangat musyawarah ini akan sempurna RUU," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo seusai penandatanganan naskah RUU Pemilu dalam rapat kerja antara pemerintah dan Pansus RUU Pemilu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Lima isu krusial yang mengganjal pembahasan, yakni ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, jumlah kursi per dapil, dan metode konversi suara. Kelima isu itu akan dibahas lewat lobi-lobi maksimal hingga tanggal 20 Juli pagi hari. Namun demikian, ditegaskan Tjahjo, pemerintah tetap berharap ambang batas pencalonan presiden berada di kisaran 20%-25%.

Bahkan, lanjut dia, pemerintah tetap membuka kemungkinan kembali ke UU lama jika keputusan *voting* di rapat paripurna terkait ambang batas pencalonan presiden berbeda dengan keinginan pemerintah.

"Opsi UU lama masih terbuka. Pemerintah bisa minta diskors kembali kan masih bisa. Bisa saja tanggal 20 (Juli) itu berubah. Bagi pemerintah, PT 20%-25% itu prinsip," ujar Tjahjo.

> "Opsi UU lama masih terbuka. Pemerintah bisa minta diskors kembali kan masih bisa. Bagi pemerintah, PT 20%-25% itu prinsip."
>
> **Tjahjo Kumolo**
> Menteri Dalam Negeri

Posisi fraksi

Rapat internal pansus sehari sebelumnya menyepakati lima paket yang bisa dipilih fraksi-fraksi terkait lima isu krusial. Namun, dalam raker kemarin, hanya lima fraksi dari koalisi parpol pendukung pemerintah yang menyatakan paket yang dipilih.

Kelima fraksi itu, yakni PDIP, Golkar, NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Hanura, sepakat memilih paket A dengan rincian ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*/PT) sebesar 20%-25%, *parliamentary threshold* 4%, sistem pemilu terbuka, alokasi kursi 3-10 kursi, dan metode konversi suara *sainte lague* murni.

Anggota pansus dari Fraksi PPP Ahmad Baidowi mengatakan, meskipun sebelumnya memilih jalan tengah PT 10%-15%, PPP membuka opsi PT 20%-20% demi tercapainya kompromi dalam pembahasan.

Dua fraksi partai pendukung pemerintah lainnya, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) kompak tidak memilih paket. Hal senada juga dilakukan tiga fraksi di luar koalisi pemerintahan, yakni Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Gerindra .

"Fraksi Gerindra belum menentukan apa yang menjadi isu-isu krusial. Maka, Fraksi Gerindra menyetui Rancangan UU untuk diambil keputusan pada tingkat berikutnya," ujar anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Gerindra Bambang Riyanto.

Saat ditemui seusai raker, Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy mengatakan, jika musyawarah gagal, kelima paket akan dibawa ke rapat paripurna untuk di-*voting*. Ia juga mengatakan sulit bagi pemerintah untuk menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu.

"Secara etika enggak boleh. Naskah UU-nya kan sudah ditandatangani. Kalau di-*voting* dan UU-nya diketok, pemerintah tidak setuju, tiga puluh hari tidak ditandatangani kan berlaku UU-nya," cetus Lukman Edy. (Deo/X-6)